

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis, perusahaan subsektor perkebunan di Indonesia secara umum telah menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap POJK 51/POJK.03/2017. Pengungkapan indikator kinerja ekonomi, tata kelola, dan sosial relatif konsisten, terutama pada aspek fundamental dan mudah diukur seperti kuantitas produksi, pendapatan, struktur organisasi, dan kegiatan tanggung jawab sosial. Hal ini mencerminkan fokus perusahaan dalam memenuhi kewajiban regulasi dan menjaga transparansi informasi penting.

Namun, masih terdapat inkonsistensi dalam pengungkapan indikator yang lebih teknis, terutama pada aspek lingkungan seperti penggunaan energi, emisi, pengelolaan limbah, dan konservasi keanekaragaman hayati. Selain itu, akuntabilitas eksternal, seperti verifikasi independen dan tanggapan umpan balik, juga relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kepatuhan formal sudah baik, perusahaan perkebunan masih perlu meningkatkan transparansi dan komitmen terhadap isu-isu keberlanjutan yang lebih kompleks dan strategis.

### **6.2. Saran**

Berdasarkan analisis, perusahaan subsektor perkebunan di Indonesia secara umum telah menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap POJK 51/POJK.03/2017 maka:

#### **1) Perusahaan Subsektor Perkebunan**

Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan, perusahaan di subsektor perkebunan disarankan untuk memperkuat konsistensi pengungkapan aspek lingkungan, terutama yang terkait dengan emisi, pengelolaan limbah, dan konservasi keanekaragaman hayati. Mengingat kegiatan perkebunan terkait langsung dengan keberlanjutan ekosistem, penyajian data yang komprehensif dan berkelanjutan menjadi penting untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap praktik berkelanjutan. Selain itu, perusahaan diharapkan untuk memperluas transparansi melalui verifikasi independen dan pencantuman umpan balik pemangku kepentingan dalam laporan keberlanjutan. Hal ini tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap ketentuan POJK 51/2017, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kredibilitas laporan di mata investor, regulator, dan masyarakat luas. Dengan demikian, laporan keberlanjutan bukan hanya dokumen kepatuhan, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun reputasi dan daya saing perusahaan perkebunan di tingkat nasional dan global.

#### **2) POJK 51/2017**

POJK 51/2017 dapat menyediakan panduan yang lebih jelas dan lebih detail lagi terutama dalam aspek lingkungan agar perusahaan dapat lebih konsisten lagi dalam melaporkan hasil sustainabilitynya. Pertimbangan regulasi juga dapat di pertimbangkan lagi agar perusahaan dapat semakin bisa lebih memperhatikan ketiga aspek penting, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.